

**KORAN
DIGITAL**

PERTAMA
& GRATIS

KORAN SULSEL

TERPERCAYA & TERDEPAN

.COM

EDISI JUMAT

29 AGUSTUS 2025

KEMENKEU: RP2,5 TRILIUN BELANJA PENDIDIKAN TERSERAP DI SULSEL



**TERDAKWA UANG PALSU SEBUT
DIMINTAI RP 5 MILIAR OLEH OKNUM
JAKSA, KEJATI SULSEL BANTAH
BACA HALAMAN ...6**



Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel Wibawa Pram Sihombing (tengah) memaparkan perkembangan penggunaan dana APBN Anging Mammiri di Makassar, Sulsel, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Muh Hasanuddin

KEMENKEU: RP2,5 TRILIUN BELANJA PENDIDIKAN TERSERAP DI SULSEL

MAKASSAR – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan alokasi belanja untuk sektor pendidikan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan realisasi mencapai Rp2,5 triliun. Anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di berbagai jenjang.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Wibawa Pram Sihombing, menjelaskan dana ini bersumber dari pajak rakyat yang kemudian dikelola negara dan dikembalikan kepada masyarakat melalui program-program kementerian. "Alokasi ini disalurkan melalui beberapa satuan kerja di kementerian, dengan tujuan memperkuat mutu pendidikan," ujarnya di Makassar, Kamis (28/8).

Ia merinci, sebagian besar anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan profesi guru (TPG) serta dosen. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendorong motivasi mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, dana juga diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang representatif dan berkualitas.

Alokasi belanja pendidikan tersebut juga menyasar sekolah-sekolah di daerah, termasuk melalui program rehabilitasi gedung sekolah yang rusak atau tidak layak pakai. "Tujuannya agar anak-anak bisa belajar di tempat yang aman, nyaman, dan kondusif," jelas Wibawa, yang juga menjabat Kepala Kanwil DJKN Sulsel.

Tak hanya itu, pemerintah turut menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya bagi madrasah, serta program beasiswa Indonesia Pintar untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. "Basiswa ini sangat penting untuk menekan angka putus sekolah sekaligus membuka kesempatan yang lebih merata bagi seluruh anak bangsa," tambahnya.

Menurut Wibawa, belanja pendidikan yang cukup besar ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi unggul. "Pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas," tegasnya. (ant/KS)

KODAM XIV HASANUDDIN TEMPATKAN PERSONEL TNI DI KEJATI DAN KEJARI SULSEL-SULTRA

MAKASSAR – Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin menugaskan personel TNI untuk diperbantukan menjaga keamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), serta sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah tersebut. Penugasan ini ditandai dengan apel pasukan sekaligus perjanjian kerja sama strategis antara TNI dan Kejaksaan.

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, menegaskan bahwa tugas pengamanan ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung stabilitas penegakan hukum. "Jadikan tugas dan pengabdian ini sebagai ladang amal. TNI berkomitmen berperan aktif menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya di lingkungan penegakan hukum," ujarnya di Kantor Kejati

Sulsel, Rabu (27/8).

Menurutnya, penempatan personel TNI merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas, yang diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung dan Panglima TNI Nomor NK/6/IV/2023/TNI. Perpres tersebut menekankan perlindungan bagi jaksa dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (AGHT) saat menjalankan tugas.

Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, menyebut kerja sama ini memiliki makna strategis karena memperkuat sinergi Kejaksaan dan TNI. "Keberadaan personel TNI di lingkungan Kejati dan Kejari bersifat strategis, mengingat dinamika penegakan hukum kerap diwarnai AGHT dari pihak tertentu. Dengan langkah preventif, jaksa dapat bekerja inde-

penden tanpa tekanan," ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah personel TNI yang ditempatkan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kajati juga mengimbau seluruh kepala Kejari segera berkoordinasi dengan Komandan Kodim di wilayahnya. "Sinergi dengan TNI tetap diimbangi dengan pelayanan hukum yang humanis kepada masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk timbal balik, Kejati Sulsel juga siap memberikan bantuan pendampingan hukum kepada jajaran TNI apabila menghadapi kendala hukum.

Apel pasukan ini turut dihadiri jajaran pimpinan kedua institusi, di antaranya Wakajati Sulsel Robert M. Tacoy, Wakajati Sultra Sugiyanta, para kepala Kejari, Komandan Korem, dan Komandan Kodim, yang menegaskan komitmen bersama dalam mengawal kerja sama strategis tersebut. (ant/KS)



Suasana apel pasukan gabungan TNI dan Jaksa di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/8/2025)



Tim Khusus Pekerjaan Dalam Keadaan Bertengangan tengah memelihara jaringan tanpa padam di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. (ANTARA/HO-PLN)

PLN MAROS USULKAN PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK UNTUK DUSUN MANGNGAI DALAM

MAROS – PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Maros melakukan survei lapangan sekaligus mengusulkan pembangunan infrastruktur kelistrikan bagi warga Dusun Mangngai Dalam (Pata-dang), Desa Damai, Kabupaten Maros, yang hingga kini belum teraliri listrik.

Manager PLN ULP Maros, Sadrach, menjelaskan petugas telah turun langsung untuk memetakan kebutuhan jaringan listrik sebelum diajukan ke tahap pembangunan. “Kami berkomitmen untuk menerangi masyarakat hingga pelosok. Mohon doa dan dukungan masyarakat

agar kami bisa segera mewujudkan terang di desa tersebut,” ujarnya di Makassar, Kamis (28/8).

Ia menegaskan, PLN selalu berupaya meningkatkan pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien, transparan, adil, wajar, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan masyarakat terkait kebutuhan listrik di Kabupaten Maros,” tambahnya.

Sementara itu, warga Dusun Mangngai Dalam, Muhammad Solle, mengungkapkan kelu-

hannya karena hingga kini sekitar 70 rumah di wilayahnya belum terhubung listrik. “PLN sudah memasang tiang sejak Desember 2024, tapi belum ada kelanjutan jaringan kabel maupun sambungan listrik. Kami juga sudah memasukkan surat permohonan, tetapi belum direspons,” ujarnya.

Ia berharap PLN segera merealisasikan pengadaan jaringan listrik tersebut. “Wilayah kami termasuk dusun tertinggal yang butuh perhatian. Semoga segera terealisasi agar masyarakat bisa menikmati listrik seperti daerah lainnya,” harapnya. (ant/KS)

WALI KOTA MAKASSAR BUKA PELUANG TEKNOLOGI BARU UNTUK ATASI SAMPAH DAN EMISI KARBON

MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan pihaknya siap membuka peluang kerja sama dengan teknologi baru, termasuk dari Australia, untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Makassar. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya volume sampah harian, tetapi juga timbunan lama yang sudah menggenung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Tantangan terbesar ada pada sampah lama di TPA. Karena itu, kami mencari teknologi yang mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Munafri di Makassar, Rabu (27/8).

Ia menambahkan, sejumlah

perusahaan rintisan dari kawasan Indonesia Timur seperti Petrogel, Energi Timur, Nusa Power, Sumba Sustainable Solutions, dan Kuantimur Tenor juga siap mendukung upaya Pemkot dalam menghadapi perubahan iklim dan persoalan sampah.

Dengan timbunan sampah harian mencapai 1.000–1.300 ton, TPA Tamangapa seluas 19 hektare kini sudah menumpuk hingga 16 meter. “Syukurlah TPA kami belum disegel Kementerian Lingkungan Hidup karena kami terus berbenah. Kami sudah mulai regulasi dari rumah tangga dan memperkuat edukasi,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar mendorong urban farming di tingkat RT/RW.

“Harapan kami, yang sampai ke TPA hanya residu, bukan semua sampah dari rumah tangga,” jelasnya.

Selain isu sampah, Pemkot Makassar juga memperkuat kerja sama internasional untuk menekan emisi karbon. Bersama Pemerintah Jepang dan Kementerian Lingkungan Hidup, Makassar menargetkan menuju status Zero Carbon City. Munafri menyebutkan, mulai tahun depan seluruh kendaraan operasional Pemkot akan beralih ke kendaraan listrik dengan sistem sewa.

“Perubahan iklim adalah tantangan global, tetapi solusinya harus berakar dari lokal,” tegas Munafri. (ant/KS)



Konjen Australia Todd Dias menyambut kedatangan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di sela Peluncuran program KINETIK NEX yang digelar pemerintah Australia di Makassar, Rabu, (27/8/2025).



Terdakwa uang palsu Annar Salahuddin Sampetoding (kanan) saat membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (27/8/2025). ANTARA/Darwin Fatir.

TERDAKWA UANG PALSU SEBUT DIMINTAI RP 5 MILIAR OLEH OKNUM JAKSA, KEJATI SULSEL BANTAH

GOWA – Sidang lanjutan perkara dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu dengan terdakwa Annar Salahuddin Sampetoding diwarnai tuduhan mengejutkan. Dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Rabu (27/8), Annar mengaku pernah dimintai uang Rp5 miliar oleh seorang penghubung yang mengatasnamakan jaksa berinisial IS, dengan janji tuntutan bebas.

“Mereka mengutus penghubung bernama Muhammad Ilham Syam menemui saya di Rutan untuk meminta uang Rp5 miliar demi tuntutan bebas demi hukum,” ucap Annar di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, alasan permintaan tersebut karena sejumlah surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Berharga Negara (SBN)

senilai Rp700 triliun telah disita Kejaksaan. Annar menegaskan tuduhan kepadanya sarat rekayasa. Bahkan, permintaan yang awalnya Rp5 miliar itu belakangan disebut diturunkan menjadi Rp1 miliar, dengan konsekuensi tuntutan hanya 1 tahun penjara. Bila tidak menyanggapi, ancamannya meningkat hingga 8 tahun penjara.

Penasihat hukum Annar, Andi Jamal Kamaruddin, menambahkan pihaknya akan melaporkan dugaan kriminalisasi kasus ini, termasuk menyeret nama mantan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan serta mantan Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak. “Kami akan laporkan ke Komnas HAM, Mabes Polri, Komisi III DPR RI hingga Presiden RI. Klien kami tidak bersalah,” tegasnya.

Bantahan Kejaksaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aria Perkasa langsung membantah tuduhan tersebut. Menurut-

nya, pernyataan terdakwa sama sekali tidak berdasar. “Tidak benar apa yang dikatakan terdakwa Annar. Tidak ada jaksa dengan nama itu, dan tidak pernah ada permintaan Rp5 miliar. Bahkan SBN yang ditunjukkan hanya berupa fotokopi, bukan dokumen asli,” tegas Aria.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, menekankan kejaksaan tetap menjunjung integritas. “Kalau memang ada bukti pemerasan, silakan dilaporkan. Kejaksaan memiliki bidang pengawasan untuk menindak pegawai atau jaksa yang berperilaku tercela,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak Kejati Sulsel akan memproses apabila ada bukti yang sahih. “Kami menjaga kredibilitas lembaga hukum negara. Jika memang terbukti ada oknum, akan diperiksa pengawas internal,” tandasnya. (ant/KS)

BPOM BERI PENGHARGAAN PEMANFAATAN DAK KEPADA SEJUMLAH DAERAH DI SULSEL

MAKASSAR – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) atas keberhasilan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) tahun 2023–2024. Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (28/8).

Staf Khusus Kepala BPOM RI Bidang Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Nor Andi Arina Wati Arsyad, mengatakan penghar-

gaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung program pengawasan obat dan makanan secara optimal. "Penghargaan ini adalah bukti komitmen daerah dalam melindungi masyarakat melalui pemanfaatan DAK yang tepat sasaran," ujarnya.

Untuk pemanfaatan DAK 2023, Kabupaten Gowa meraih juara pertama, disusul Pinrang, Luwu Utara, dan Wajo di posisi kedua, serta Jeneponto sebagai juara ketiga. Sementara untuk DAK 2024, Wajo keluar sebagai terbaik pertama, Maros terbaik kedua, dan Gowa

terbaik ketiga.

Nor Andi menegaskan bahwa DAK Non-Fisik BOK POM menjadi instrumen penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, sekaligus memperkokoh sinergi antara pusat dan daerah. "Pengelolaan DAK yang tepat memungkinkan pengawasan berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat terlindungi secara maksimal," katanya.

Menurutnya, capaian ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih baik. (ant/KS)



Kepala BPOM Taruna Ikrar didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kabupaten di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Abd Kadir



Wali Kota Makassar Munafrri Arifuddin saat bertukar cinderamata dengan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat berkunjung ke Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

WALI KOTA MAKASSAR SAMPAIKAN ASPIRASI WARGA KEPULAUAN KE WAKIL KETUA MPR RI

MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafrri Arifuddin, menyampaikan langsung sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam kunjungan kerjanya di Balai Kota Makassar, Kamis (28/8).

Munafrri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar warga di delapan pulau berpenghuni dengan populasi sekitar 12 ribu jiwa. Aspirasi yang disampaikan mencakup ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang lebih layak. "Listrik PLN di pulau-pulau masih belum maksimal, dermaga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian, sementara akses pendidikan juga harus diperkuat agar

anak-anak tidak putus sekolah," jelasnya.

Ia mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di salah satu pulau yang bisa dijadikan pusat pendidikan terpadu mulai dari SD, SMP hingga SMA. "Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Tentunya ini perlu didukung jaringan listrik dan infrastruktur lainnya," tambahnya.

Selain pendidikan, Munafrri juga menyoroti layanan kesehatan serta insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan yang masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Saat ini, kebutuhan energi warga masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

berbahan bakar solar. "Kalau distribusi solar terganggu, listrik langsung terhenti. Kami mendorong PLN mencari solusi permanen," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan komitmen pemerintah pusat menyiapkan solusi strategis, salah satunya terkait pengelolaan sampah di berbagai daerah. Pemerintah bersama Kementerian Lingkungan Hidup tengah memformulasikan pembangunan 33 unit incinerator berkapasitas minimal 1.000 ton per hari untuk daerah-daerah yang TPA-nya sudah penuh. "Alternatif pengelolaan sampah harus segera diterapkan agar daerah tidak lagi bergantung pada lahan pembuangan sementara," kata Eddy. (ant/KS)

GRATIS
TANPA IURAN

E-PAPER

koranusantara
www.koranusantara.com

EDISI JUMAT
29 AGU 2025



POLRI AMANKAN TUJUH ANGGOTA BRIMOB USAI DRIVER OJOL TEWAS DILINDAS RANTIS DI TENGAH DEMO DPR

BACA HALAMAN 2



**KPK MINTA KENDARAAN DARI
RUMAH DINAS IMMANUEL
EBENEZER DIKEMBALIKAN**



Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim saat menyampaikan keterangan. (Ist)

POLRI AMANKAN TUJUH ANGGOTA BRIMOB USAI DRIVER OJOL TEWAS DILINDAS RANTIS DI TENGAH DEMO DPR

JAKARTA – Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim memastikan tujuh anggota Brimob telah diamankan terkait insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas mobil taktis (rantis) saat demonstrasi di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025).

“Saat ini pelaku sudah kita amankan dan dalam proses pemeriksaan gabungan antara Propam Mabes Polri dan Propam Brimob, karena pelaku merupakan personel Brimob,” ujar Abdul Karim dalam konferensi pers di RSCM, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Ia menjelaskan, ketujuh per-

sonel yang diamankan berasal dari satu kendaraan. Mereka terdiri atas Kopol CDC berinisial C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

“Masih kita dalam siapa yang mengemudikan rantis. Yang jelas, tujuh orang ini berada di satu kendaraan. Perannya sedang kita dalam pemeriksaan. Akan kami update,” tegasnya.

Abdul menambahkan, pemeriksaan akan dilakukan secara cepat, transparan, dan melibatkan pihak eksternal. “Kami koordinasi dengan Kopolnas untuk melakukan pengawasan agar pemeriksaan berjalan transparan

dan objektif,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengonfirmasi korban tewas adalah seorang sopir ojol. Ia menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam atas insiden tersebut.

“Kami sangat berduka kehilangan saudara kita akibat kejadian sore tadi. Atas nama Polda Metro Jaya dan satuan, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam serta turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum,” kata Asep.

Penulis: Fajri

Editor: Agus S



Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (kiri) menangis saat berjalan menuju ruang konferensi pers usai terjaring OTT KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

KPK MINTA KENDARAAN DARI RUMAH DINAS IMMANUEL EBENEZER DIKEMBALIKAN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kerabat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) yang memindahkan tiga kendaraan roda empat dari rumah dinas Wamenaker, yakni setelah kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).

"Itu kemungkinan secara spontan kerabatnya atau mungkin juga orang-orangnya memindahkan mobilnya dari tempat atau dari rumahnya," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Cuntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8) malam.

Oleh sebab itu, Asep mengatakan KPK mengimbau pihak tersebut untuk mengantarkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada lembaga antirasuah agar penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan semakin terang.

"Kami dari penyidik mengimbau kepada siapa pun ya, apakah itu kerabat saudara IEG, ataupun mungkin pegawainya, atau siapa pun orang dekatnya yang merasa memindahkan kendaraan, agar segera dikirim atau diserahkan kepada kami, diantar ke KPK ini," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan

KPK baru mencari tiga kendaraan tersebut karena sebelumnya saat OTT mendapatkan fakta adanya pemberian satu kendaraan roda dua kepada Immanuel Ebenezer dari Irvian Bobby Mahendro (IBM).

"Jadi, ketika tim itu mengamankan saudara IBM, kemudian dilakukan interogasi, nah yang disampaikan pada saat itu secara spontan oleh saudara IBM, yang mengalir ke saudara IEG itu uang Rp3 miliar kemudian motor Ducati. Jadi, makanya yang kami ambil pada saat itu adalah motornya karena uangnya mungkin sudah digunakan oleh saudara IEG," jelasnya.

Setelah itu, kata dia, KPK menemukan informasi adanya beberapa alat bukti yang belum disita terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, namun dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut identitas 11 tersang-

ka pada waktu terjadinya perkara tersebut:

1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)
2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)
3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)
4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)
5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurrozi (FAH)
6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)
7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)
8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)
9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)
10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)
11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

Pada 26 Agustus 2025, penyidik KPK mendapatkan informasi terdapat sejumlah kendaraan roda empat, yaitu Land Cruiser, Mercedes-Benz, dan BAIC, yang dipindahkan dari rumah dinas Wamenaker setelah kegiatan OTT. (ANT/KN)



Mobil Rantis Brimob sesaat sebelum melindas driver ojek online di Benhil. (Ist)

DRIVER OJOL TEWAS TERLINDAS MOBIL RANTIS BRIMOB DI BENHIL, WARGA TERIAK HISTERIS

JAKARTA—Peristiwa tragis terjadi di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Kamis malam (28/8/2025). Seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas terlindas mobil taktis (rantis) Brimob jenis Baracuda saat situasi demonstrasi di Pejompongan, Jakarta Pusat, memanas.

Sekitar pukul 19.25 WIB, aparat kepolisian menahan massa demonstran di persimpangan lampu merah Pejompongan, tepatnya di area SPBU Pejompongan. Puluhan pelajar yang hendak menuju Gedung DPR dihentikan paksa, bahkan beberapa di antaranya terjatuh dari motor.

Insiden maut terjadi 15 menit kemudian, sekitar pukul 19.40 WIB di dekat SPBU Jalan Lamper, Benhil. Sebuah mobil Baracuda Brimob melaju kencang dan menabrak seorang driver ojol.

Setelah menabrak, kendaraan tersebut sempat berhenti sesaat lalu kembali melaju hingga melindas tubuh pengemudi ojol itu.

“Ya Allah.. Ya Allah.. Ya Allah.. diinjak (dilindas), diinjak (dilindas),” teriak seorang warga yang histeris menyaksikan kejadian tersebut. Massa yang berada di lokasi sontak marah dan berusaha mengejar mobil Brimob yang langsung kabur dengan kecepatan tinggi.

Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh warga bersama sesama pengemudi ojol, namun nyawanya tak tertolong. Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, membenarkan kabar duka tersebut.

“Dipastikan meninggal di RSCM, itu driver Gojek yang terlindas barakuda tadi,” kata Andi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Kaltim, kor-

ban diketahui bernama lengkap Affan Kurniawan (21), warga Palmerah, Jakarta Barat. Ia menjadi korban saat aparat melakukan pembubaran massa demonstrasi di kawasan Pejompongan, Tanah Abang.

Video detik-detik kejadian beredar luas di media sosial. Seorang wanita terdengar menjerit sambil menyebut polisi tidak berhenti meski telah melindas korban. “Ya Allah benar-benar dilindas. Merinding sebadan-badan. Polisinya enggak mau berhenti, kasihan abang gojeknya,” ucapnya dalam rekaman video.

Korban diduga tengah melintas ketika mobil Brimob melaju kencang. Tubuhnya terseret sebelum akhirnya meninggal dunia setelah terlindas roda kendaraan berat tersebut.

Penulis: Fajri

Editor: Agus S



Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit saat memberikan pernyataan maaf dalam insiden ojol dilindas mobil Rantis Brimob. (Ist)

KAPOLRI MINTA MAAF KE KELUARGA OJOL TEWAS TERTABRAK RANTIS BRIMOB

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demo ricuh di Jakarta, Kamis malam (28/8/2025).

Permintaan maaf tersebut disampaikan Sigit ketika mendampingi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Jumat (29/8) dini hari, sesaat setelah jenazah korban berada dalam penanganan medis.

“Kami menyampaikan belasungkawa dan juga minta maaf kepada keluarga almarhum ter-

kait musibah yang terjadi,” kata Listyo.

Tragedi ini menambah catatan kelam dalam penanganan aksi unjuk rasa. Insiden ojol yang tewas terlindas rantis Brimob memicu sorotan publik dan menimbulkan kritik terhadap prosedur kepolisian dalam menangani massa demonstrasi.

Selain menyampaikan belasungkawa, Kapolri juga menemui pengurus lingkungan tempat tinggal korban untuk memastikan seluruh kebutuhan almarhum, termasuk pemakaman, dapat terpenuhi. “Kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga hal-hal

lain yang diminta keluarga almarhum,” ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengonfirmasi tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya telah diamankan dan diperiksa terkait insiden tersebut. “Saat ini tujuh anggota Satbrimob sedang diperiksa untuk mengetahui kronologi dan tanggung jawab,” katanya.

Ketujuh personel yang berada dalam kendaraan rantis itu masing-masing berinisial Kopol C, Aipda M, Bripta R, Bripta B, Bripta M, Baraka Y, dan Baraka J.

**Penulis: Fajri
Editor: Agus S**



Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/pri.

ISTANA MINTA POLISI USUT INSIDEN RANTIS BRIMOB TABRAK OJOL DI JAKARTA

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, meminta kepolisian segera mengusut kejadian kendaraan taktis (rantis) Barracuda yang diduga kuat milik Brimob melindas pengendara ojek online hingga dikabarkan korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.

Insiden tersebut terjadi saat kepolisian berupaya membubarkan massa aksi demonstrasi di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

"Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar, dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian, termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Pras, sapaan populer Prasetyo,

menyebut Istana terus-menerus berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan kepolisian agar dapat menjaga situasi tetap kondusif.

"Sekecil apapun jika ada kejadian, tentunya kita semua pasti menyayangkan, dan tidak ingin hal itu terjadi," sambung Pras.

Prasetyo lanjut memohon maaf atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut.

Kejadian rantis Brimob melindas pengendara ojek online tersebar di berbagai akun media sosial warga yang merekam insiden tersebut. Kendaraan taktis tersebut, setelah melindas korban, lanjut memacu kecepatan dan meninggalkan lokasi kejadian. Sejumlah warga dan pengendara yang geram pun mengejar kendaraan tersebut hingga ke Jalan Layang Non-Tol Casablanca.

Korban, yang diketahui seorang laki-laki, dikabarkan meninggal dunia saat dibawa

ke rumah sakit terdekat di kawasan Jakarta Pusat. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dikabarkan akan menggelar jumpa pers di RSCM, Jakarta Pusat, pada pukul 23.00 WIB.

Aksi unjuk rasa yang semula terpusat di depan Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, sejak siang hari, kemudian berlanjut sampai sore hari berujung ricuh.

Massa yang menolak dibubarkan paksa oleh polisi melawan balik tembakan gas air mata dan water cannon polisi dengan lemparan batu, petasan, dan botol-botol.

Beberapa lokasi di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, pun menjadi tempat massa bentrok dengan aparat. Titik-titik terjadinya bentrok itu antara lain di Jalan Penjernihan, Jalan Penjompangan, Bendungan Hilir, KS Tubun Petamburan, dan Palmerah. (ANT/KN)



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan pada Peresmian dan Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025: Trade, Tourism, Investment, and Procurement di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa

PRESIDEN PRABOWO TEGUR DIREKSI BUMN YANG 'BERTINGKAH BAK RAJA'

TANGERANG - Presiden Prabowo Subianto menyatakan heran ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang berlaku bak raja dalam memimpin perusahaan yang sejatinya milik negara.

Prabowo kemudian memperingatkan direksi-direksi BUMN yang bertingkah demikian untuk merenungkan kembali posisi mereka itu dapat diganti oleh siapa saja dan kapan saja.

"Di Indonesia ini, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," kata Presiden Prabowo saat berbicara

dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Pada kesempatan sama, Prabowo langsung memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut dan memeriksa manakala ada direksi-direksi BUMN yang dicurigai melanggar aturan.

"Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini," ujar Presiden.

Presiden kembali menyebut dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara, yang merupakan sovereign wealth fund-nya Indonesia, aset-aset milik negara yang semula tercecer saat ini terkumpul menjadi satu.

"Seribu miliar dolar (AS) sovereign wealth fund kita, sekarang, mungkin ke-5 ya, ke-5 di dunia. Norway, China -- China itu sebetulnya punya tiga-, Abu Dhabi,

baru kita. Tidak main-main, selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya," kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan dirinya tegas ingin membereskan tata kelola BUMN dan manajemen BUMN yang ternyata tidak sesuai aturan serta boros.

"Kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya enggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisisarnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN, red.)," ujar Presiden Prabowo. (ANT/KN)

IKN PERTEGAS BATAS WILAYAH DENGAN BALIKPAPAN JELANG PEMDASUS

PENAJAM PASER UTARA - Batas administratif Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kota Balikpapan diklarifikasi menjelang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah khusus (pemdusus) oleh Otorita IKN.

"Saat ini sedang dilakukan pematangan persiapan penyelenggaraan Pemdusus IKN," ujar Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan Otorita IKN Kuswanto ketika ditanya mengenai pemdusus di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis (28/8/2025).

Salah satu yang dilakukan adalah penegasan batas wilayah IKN dengan daerah sekitarnya, lanjut dia, termasuk Kota Balikpapan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah menetapkan batas IKN, peta skala 1: 400.000 sehingga perlu pendetailan dengan peta skala besar, serta dilakukan penataan wilayah terhadap desa dan kelurahan yang terdampak adanya IKN.

Penegasan batas wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Kemudian juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Dan juga Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara," jelasnya.

Regulasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena terjadi perubahan entitas wilayah, sebelumnya Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Dengan adanya IKN, batas wilayah harus ditinjau ulang dan ditegaskan kembali," ucapnya.

Penegasan batas wilayah melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkab Penajam Paser



Tim batas wilayah melakukan survei ke lapangan menentukan tapal batas IKN dengan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/HO-dokumen Humas Otorita IKN

Utara, Pemkab Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemkot Balikpapan, bahkan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga dilibatkan.

Sebelumnya, Otorita IKN bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah beberapa kali melakukan pembahasan.

Bukan hanya persoalan garis batas, tetapi juga penataan wilayah dan tim batas wilayah dari Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke lapangan.

Kendati sudah ada regulasi atau dasar hukum batas wilayah Kota Balikpapan, menurut dia, perlu menyesuaikan kembali karena entitas wilayah berubah.

Penyesuaian garis batas empat kelurahan IKN berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, antara lain Kelurahan Salok Api Laut (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas alami berupa sungai.

"Seluruh badan sungai masuk wilayah IKN, tetapi pemanfaatan dapat digunakan bersama," ungkapnya.

Kelurahan Salok Api Darat (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas berupa jalan dan pilar batas utama (PABU) sebagaimana

diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2017.

Kelurahan Karya Merdeka (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Karangjoang (Balikpapan Utara), dengan batas berupa jalan yang menyesuaikan Jalan Vico dan PABU sesuai aturan.

"Kelurahan Mentawir (Sepaku) berbatasan dengan Kelurahan Kariangau (Balikpapan Barat), dengan batas jalan dan PABU sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2012," ujarnya.

Regulasi atau peraturan menetapkan batas wilayah, tetapi pendetailan tetap diperlukan, timpal dia lagi, agar garis batas tidak memotong rumah penduduk, jalan, sungai, bidang tanah, atau fasilitas umum, sehingga kewenangan pengelolaan jelas.

"Penegasan batas wilayah dituangkan dalam Permendagri, penetapan tapak batas penting dalam pelaksanaan fungsi IKN sebagai pemdusus," tegasnya.

Setelah mencapai kesepakatan penegasan batas wilayah, ditan-datangi bersama Kepala Otorita IKN, Wali Kota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara, kemudian diajukan kepada Kemendagri untuk ditetapkan secara resmi, jelas Kuswanto. (ANT/KN)



Suasana pelaksanaan GPM di Tenggarong. (Ady/MKG)

SINERGI PEMKAB KUKAR DAN KEJAKSAAN NEGERI, HADIRKAN PANGAN MURAH UNTUK TEKAN INFLASI

TENGGARONG – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Creative Park Tenggarong, Kamis (28/8/2025), menjadi bukti nyata bagaimana sinergi lintas sektor mampu menghadirkan solusi langsung bagi masyarakat.

Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kejaksaan Negeri Kukar ini, bukan sekadar seremoni peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan ke-80, tetapi menghadirkan manfaat konkret dalam menjaga daya beli warga.

Ratusan warga terlihat antusias menyerbu stan pangan murah, yang menjajakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Beras, cabai, dan bawang merah menjadi komoditas favorit yang dijual jauh di bawah harga pasar.

Antusiasme ini sekaligus menunjukkan bahwa program semacam GPM sangat dibutuhkan. Terutama di tengah fluktuasi harga yang kerap membebani

masyarakat kecil.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang hadir langsung meninjau lapangan, menyaksikan bagaimana warga berbondong-bondong memanfaatkan momentum ini. Ia menegaskan, kolaborasi dengan Kejaksaan membuktikan bahwa kerja sama lintas lembaga mampu menghadirkan solusi cepat dan tepat sasaran.

Menurutnya, stabilisasi harga pangan tidak bisa hanya menjadi tugas satu pihak, melainkan harus melibatkan sinergi banyak sektor. “Gerakan pangan murah ini membuktikan bahwa kerja sama lintas sektor bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” ujar Aulia.

Selain meringankan beban warga, kegiatan ini memperlihatkan peran strategis Kejaksaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam urusan non-penegakan hukum. Kolaborasi seperti ini menjadi model yang dapat diperluas ke sektor lain, baik di bidang

kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi kerakyatan.

“Tadi kita sudah berkeliling, kita juga sudah melihat bahwa masyarakat dengan antusias memanfaatkan atau menikmati manfaat dari gerakan pangan murah ini,” ungkapnya.

Pemkab Kukar berharap, GPM tidak hanya berhenti di Tenggarong, tetapi juga digelar di kecamatan lain agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya.

Dengan harga pangan yang stabil, daya beli warga dapat terjaga. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Kukar untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.

“Tentunya kami juga berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kukar yang berkolaborasi dengan kami sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan,” tutup Aulia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Suaasana pelaksanaan Lanjong Art Festival 2025 (Ady/MKG)

LANJONG ART FESTIVAL 2025 JADI PANGGUNG DIPLOMASI BUDAYA, KUKAR KIAN PERCAYA DIRI DI LEVEL INTERNASIONAL

TENGGARONG – Malam puncak Lanjong Art Festival 2025 di Ladang Budaya Tenggarong, Rabu (28/8/2025), tak hanya menutup rangkaian pertunjukan seni. Ia menjadi simbol bagaimana Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan diri dalam arus diplomasi budaya global.

Dengan mengusung tema “Habis Barat, Terbitlah Timur”, festival ini menegaskan posisi Kukar sebagai bagian penting dari pusat kreativitas Asia. Pertunjukan lintas negara mulai dari Brasil, Jepang, Singapura, Malaysia, hingga Spanyol. Berpadu dengan talenta lokal, memperlihatkan pergeseran perhatian dunia ke arah timur.

Setiap sajian bukan sekadar hiburan, melainkan bahasa universal yang menyatukan perbedaan. Musik, teater, dan kolaborasi lintas disiplin tampil sebagai medium yang menghubungkan Kukar dengan dunia. Penonton larut, seakan merasakan pesan yang menembus batas geografis dan budaya.

Dewan Pembina Yayasan Lanjong, Dedi Nala Arung, menekankan pentingnya festival ini sebagai ruang apresiasi yang bermakna. Bagi masyarakat Kukar, kehadirannya membuka akses langsung pada seni global tanpa harus keluar daerah.

“Festival ini kami rancang agar masyarakat tidak hanya menonton hiburan, tapi juga merasakan nilai tinggi dari setiap penampilan,” ungkapnya.

Rangkaian acara dalam enam hari penuh bukan sekadar pesta seni, melainkan momentum membangun kesadaran publik bahwa Kukar bisa menjadi pusat seni kontemporer Kalimantan. Dukungan komunitas, penonton, dan media menjadi bukti bahwa ekosistem seni di daerah ini terus tumbuh.

Penampilan Panji Sakti di malam terakhir menambahkan lapisan emosional yang memperkuat narasi festival yang menggaungkan seni adalah energi yang menyatukan. Kekuatan musik menjadi penutup yang memberi kesan mendalam, se-

olah mengikat semua penonton dalam satu pengalaman kolektif.

“Enam hari penuh bukan waktu yang singkat. Kehadiran penonton, dukungan komunitas, hingga kerja keras panitia, semuanya menjadi bagian penting dalam keberhasilan festival ini,” katanya.

Meski Lanjong Art Festival hanya hadir dua tahun sekali, Yayasan Lanjong menyiapkan agenda lain agar denyut seni tak pernah padam. Program ini diharapkan menjaga gairah masyarakat menikmati karya seni berkualitas secara berkesinambungan.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada media yang konsisten mengawal festival. Publikasi menjadi kunci agar gaung seni lokal menembus ranah nasional bahkan internasional.

“Peran media sangat penting. Tanpa publikasi, acara ini bisa saja lewat begitu saja. Kami sangat berterima kasih,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi'i